

JURNAL SOSIAL HUMANIORA

ISSN 2087-4928

**JSH Volume 11 Nomor 105- 224
Oktober 2020**

PENGARUH CITY IMAGE DAN CITY BRANDING TERHADAP VISIT INTENTION DI WISATA BAHARI PROVINSI JAWA TIMUR. Darwin Yuwono Riyanto, Novan Andrianto, Abdullah khoir Roqqoh.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARGA MISKIN DI KOTA PONTIANAK. Martoyo.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. Wardati, Zulmasyhur, Susanti.

KAJIAN TENTANG KEPUTUSAN PENBELIAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. Agung Wijaya, Jeni Wulandari, Prasetya Nugeraha.

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN DALAM SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018. Muhammad Nizar, Ane Permatasari.

PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT URUG UNTUK IRIGASI PERTANIAN DI BOGOR JAWA BARAT. Bahagia, Fachruddin Majeri Mangunjaya, Zuzy Anna, Rimun Wibowo

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BOGOR DI HUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Devi Aprianti, Endeh Suhartini, Ani Yumarni.

MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA. Nurwati, Adi Sulistiyono, Martin Roestamy.

TRADISI SELAMATAN CEMBENGAN DALAM MEWUJUDKAN KETERATURAN SOSIAL (Studi Deskriptif di PG-PS Madukismo) . Resna Trimerani.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PROSES PELAPORAN KEUANGAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA. Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Djuanda Bogor**

JURNAL SOSIAL HUMANIORA
Volume 11, Nomor 2, Oktober 2020

Editorial in Chief

Dr. Hj Rita Rahmawati M. Si

Editorial Board

Prof. Dr. Novel Lyndon
Dr. Anas Alhifni S. S. I, M. Si Dr.
Tyas Retno Wulan, M. Si Ass.
Prof. Lubna Zaheer Dra.
Dr. (Cand) Dwi Gemina M. Si
Dr. Widyasari S. TP, M. Pd
Drs. Gotfridus Goris Seran M. Si
Dr. Hj. Endeh Suhanrtini S.H
Dr. Hj. Ike Rachmawati, Dra., M. Si,

Managing Editor

Dr. (Cand) Ginung Pratidina, Dra., M. Si

Layout Editor

Nadia Amalia, S.I.Kom

Reviewer

Dr. Rasmitadila, ST., M. Pd
Dr. Sultan Zainudin, M.Si
Dr. Hidayat, M. Si.
Dr. Muhammad Zid, M.Si
Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH. Dr.
Dr. Lucky Hikmat Maulana, SE. M. Si.
Dr. Abubakar Iskandar, Drs. M. Si

Tentang Jurnal

Jurnal Sosial Humaniora yang diterbitkan sejak tahun 2015. Redaksi menerima naskah dengan ketentuan sesuai dengan Panduan bagi Penulis. Penulis dapat mengirimkan naskahnya dengan Register atau mengirimkan e-mail ke jsh.lppm@unida.ac.id dan menyertakan Surat Pernyataan Orisinalitas dan Pemindahan Hak Cipta yang ditandatangani oleh semua penulis (materai 6000)

Alamat Redaksi

JURNAL SOSIAL HUMANIORA
Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi 1, Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720
Telp: (0251)8240773, Fax : (0251) 8240985
E-mail: jsh.lppm@unida.ac.id

DAFTAR ISI
JURNAL SOSIAL HUMANIORA
VOLUME 11 NOMOR 2 TAHUN 2020

PENGARUH CITY IMAGE DAN CITY BRANDING TERHADAP VISIT INTENTION DI WISATA BAHARI PROVINSI JAWA TIMUR. Darwin Yuwono Riyanto, Novan Andrianto, Abdullah khoir Roqqoh.	105-113
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARGA MISKIN DI KOTA PONTIANAK. Martoyo.	114-120
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. Wardati, Zulmasyhur, Susanti.	121-140
KAJIAN TENTANG KEPUTUSAN PENBELIAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. Agung Wijaya, Jeni Wulandari, Prasetya Nugeraha.	141-151
PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN DALAM SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018. Muhammad Nizar, Ane Permatasari.	152-168
PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT URUG UNTUK IRIGASI PERTANIAN DI BOGOR JAWA BARAT. Bahagia, Fachruddin Majeri Mangunjaya, Zuzy Anna, Rimun Wibowo	169-181
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BOGOR DI HUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Devi Aprianti, Endeh Suhartini, Ani Yumarni.	182-189
MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA. Nurwati, Adi Sulistiyono, Martin Roestamy.	190-202
TRADISI SELAMATAN CEMBENGAN DALAM MEWUJUDKAN KETERATURAN SOSIAL (Studi Deskriptif di PG-PS Madukismo) . Resna Trimerani.	203-213
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERDAHAP PROSES PELAPORAN KEUANGAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA. Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy.	214-224

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARGA MISKIN DI KOTA PONTIANAK

IMPLEMENTATION OF POOR FAMILY EMPOWERMENT POLICY IN PONTIANAK CITY

Martoyo^{1a}

¹Fekultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak.

^a Korespondensi: Martoyo E-mail: martoyo@gmail.com
(Diterima: 02-11-2019; Ditelaah: 07-11-2019; Disetujui: 08-09-2020)

ABSTRACT

The focus of this research is the implementation of the policy of poverty communities empowering of family welfare income increasing group (UPPKS) at Pontianak City. These study were answered the question of how was implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group at Pontianak City were implemented. There were a correlation between the unsuccessful of poverty communities empowering policy implementation to the organizational activities, interpretation, and application of policy implementation. These study used a qualitative descriptive method with its main instrument were the researcher itself, where collecting process, analysis, interpretation, and data verification of any primary and secondary data information which have been obtained through in-depth interviews, observation, and documentation of background events setting, situation, and empirical condition of poverty communities empowering policy UPPKS group at Pontianak City which were expressed objectively. The study found that implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group has not successful yet to achieve, due to unoptimized capacity of the implementing authorities on to implemented their organizational activities, interpretation, and application. The most crucial thing on to implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group was commitment and implementor's alignment from leader to implementor level to implement the policy in accordance with policy objectives. Believed that to the existency of comitment and implementor's allignment, the implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group will be effective according to policy's goals.

Keywords: Empowering, Policy Implementation, Poverty Communities.

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kota Pontianak. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak dilaksanakan. Belum berhasilnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak ada kaitannya dengan kegiatan organisasi, interpretasi dan aplikasi dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, di mana proses pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan verifikasi data

dari setiap informasi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terhadap seting latar peristiwa, situasi dan kondisi empiris proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak diungkapkan secara obyektif. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS belum berhasil mencapai tujuan kebijakan, dikarenakan belum optimalnya kapasitas aparat pelaksana kebijakan dalam menerapkan kegiatan organisasi, interpretasi dan aplikasi. Hal yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS adalah komitmen dan keberpihakan implementor dari tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Diyakini, dengan adanya komitmen dan keberpihakan implementor, maka implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin kelompok UPPKS akan berjalan efektif sesuai tujuan kebijakan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin.

Martoyo. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin di Kota Pontianak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 114-120.

PENDAHULUAN

Menanggulangi kemiskinan merupakan sama dengan upaya pemberdayaan orang miskin untuk mandiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan lainnya. Kondisi kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan mencakup erat pada spek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini memerlukan adanya kebijakan yang komprehensif dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Niko (2019) menyebutkan bahwa masyarakat miskin tidak hanya dilihat pada sisi ekonomi saja, melainkan sosial politik dan budaya.

Kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat tidaklah mudah, dimana suatu kebijakan yang hendak diformulasikan jika tidak melibatkan berbagai kelompok kepentingan dan *stakeholders* sebagai pengguna, sering mengalami kegagalan dalam implementasinya. Kemudian, dalam penanggulangan kelompok masyarakat miskin ini juga dituntut partisipasi kelompok sasaran, sehingga efektivitas program pemberdayaan untuk mengubah keadaan perekonomian kelompok miskin ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, acap kali dijumpai banyak kebijakan

pemberdayaan masyarakat miskin yang sering menimbulkan resistensi, tidak saja di kalangan pejabat tetapi juga di kalangan masyarakat kelompok sasaran, sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil di implementasikan. Studi Sonda, Kiyai, & Kolondam (2016), Priambodo (2015), dan Maryuni, (2015) menyebutkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat pada suatu wilayah tertentu perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan kelompok sasaran, sehingga hal ini akan memungkinkan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat bawah, hal ini untuk meningkatkan sistem yang terbuka (transparansi), efisien dan pengelolaan dana pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurut Saefullah (2009) keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya, akan tetapi yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Smith (1973), Stachowiak, et al. (2016), Signe (2017) dan Khan, (2016) menyebutkan bahwa suatu implementasi kebijakan (policy implementation) adalah proses dalam pembangunan yang

menterjemahkan suatu rencana pembangunan dalam kebijakan menjadi suatu program nyata yang memberi dampak kepada masyarakat luas.

Kemudian, Grindle (1980) menyebutkan bahwa model implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan.

Walaupun ide dasar kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin kelompok UPPKS tersebut telah berupaya menyentuh masalah yang cukup mendasar yang dihadapi kelompok UPPKS berupa keterbatasan modal dan akses kepada sumber keuangan. Akan tetapi menurut Wahab (1998) kemampuan aktor-aktor kebijakan bekerja dalam sebuah tim kerja yang terorganisir dengan rapi sangat menentukan tingkat keberhasilan sebuah program.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Stewart (1994, dalam Revida, 2005) dan Vroom (1964, dalam Revida, 2005) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan adanya pemberdayaan aparatur birokrasi, sehingga kualitas pelayanan kebijakan menjadi efisien, efektif, responsif dan adil. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan *performance* dan perilaku aparatur pelaksana kebijakan masih mencerminkan sebagai penguasa dan pemilik program (kebijakan).

Program pemberdayaan masyarakat miskin ini bermaksud meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang ada. Implementasi kebijakan program pemberdayaan ini dilaksanakan

dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat yang merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Proefschrift, 1974; Khan & Khandaker, 2016; Tika, Hanafi, & Riyanto, 2017). Artinya bahwa partisipasi aktif kelompok sasaran menjadi sangat penting dalam melihat keberhasilan atau kegagalan program/implementasi kebijakan pemberdayaan.

Penelitian ini mencakup beberapa aspek dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS yang dilakukan oleh kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Pontianak dimaksudkan untuk menemukan fakta di lapangan yang akan dideskripsikan dan dianalisis untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS mencapai tujuan kebijakan yakni terbentuknya keluarga sejahtera.

MATERI DAN METODE

Peneliti menentukan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pada proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang diletak pada peran implementor dalam mengimplementasikan kebijakan UU no.10/1992 Jo.UU no.52/2009, Inpres no.03/1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, KepmenBUMN.No.Kep-216/M-PBUMN/1999tentang Kemitraan pemberdayaan masyarakat miskin. Kemudian peran implementor yang didasarkan pada PP no.41 /2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Perda.no.11/2008 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak serta Perwako No.45/2008.tentang Tupoksi dan Tata kerja kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Pontianak

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi dengan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Teknik pengumpulan dan pencatatan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan dengan melihat lebih jauh aspek-aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi implementasi pemberdayaan kelompok UPPKS di Kota Pontianak dilakukan aktor pelaksana kebijakan yakni petugas PLKB dan petugas dari dinas Koperasi dan UKM dan dinas Perindag).

Pelaksanaan observasi lapangan disertai juga dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara ditinjaulanjuti dengan pengecekan pada kepustakaan dengan melakukan studi dokumentasi. Selain itu peneliti juga melakukan triangulasi/gabungan dalam teknik pengumpulan dan pencatatan data tersebut. Selanjutnya analisis ini peneliti lakukan dari proses menyusun dan mengklasifikasi data dalam kategori (kategorisasi), konseptualisasi dan kontekstualisasi dan interpretasi untuk memperoleh makna serta menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin

Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan fasilitas organisasi berimplikasi terhadap rendahnya konsistensi komunikasi aparatur pelaksana dalam mematuhi standar tujuan, mekanisme dan prosedur kerja kebijakan, sehingga sasaran implementasi kebijakan

pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak yakni peningkatan pengetahuan dalam berusaha, peningkatan peran dan fungsi kelompok dalam berusaha, peningkatan usaha/produksi, peningkatan akses terhadap mitra usaha dan peningkatan jaringan pemasaran produk/usaha kelompok UPPKS belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan baik dilihat dari sisi organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Dalam tataran praktis kegiatan organisasi implementor kebijakan belum konsisten mematuhi struktur dan prosedur kerja serta standar dan tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dalam interpretasi kebijakan, pelaksanaan komunikasi antara organisasi implementor kebijakan belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap pelaksanaan koordinasi antara implementor kebijakan dan masih berjalan secara spasial serta bersifat inklusif pada level organisasi yang diwakilinya, sehingga interpretasi kebijakan belum berjalan dengan optimal.

Pelaksanaan aplikasi prosedur kerja, standar operasional dan tujuan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS belum dapat diakses secara optimal guna mewujudkan sasaran kebijakan. Hal ini sebagai akibat masih kuatnya sifat ego sektoral dan rendahnya komitmen dan keberpihakan di kalangan aparat pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pengabdian mewujudkan tujuan kebijakan, sehingga komitmen dan keberpihakan para pelaksana belum mampu menggerakkan kebersamaan berusaha di antara anggota kelompok UPPKS dalam mewujudkan terciptanya ketahanan dan kemandirian keluarga di bidang ekonomi dan terwujudnya keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera.

Dengan demikian, proses implementasi kebijakan yang terdiri atas organisasi, interpretasi dan aplikasi. Proses ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di bidang pemberdayaan

usaha kelompok. Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS yang diidentifikasi melalui kegiatan pembinaan peningkatan pengetahuan dalam berusaha.

Peningkatan peran dan fungsi kelompok dalam berusaha, peningkatan usaha/produksi, peningkatan akses terhadap mitra usaha dan peningkatan jaringan pemasaran bagi usaha kelompok UPPKS sangat ditentukan oleh kemampuan implementor dalam mengorganisasikan segala sumber daya yang dibutuhkan agar proses interpretasi maupun aplikasi implementasi kebijakan mudah dilaksanakan.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

Kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS merupakan kebijakan "beyond family planning", yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin khususnya keluarga peserta KB sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009. Sama halnya dengan wilayah lain di Indonesia, di Provinsi Kalimantan Barat kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat sesuai PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan, di Kota Pontianak saat ini dilaksanakan oleh kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) dengan melibatkan instansi terkait di tingkat Kota Pontianak yakni dinas Koperasi Dan UKM (Usaha Kecil Menengah), Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Perda Kota Pontianak nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak serta lembaga BUMN (BNI46 dan PLN cabang Pontianak) yang di koordinasi dan diketuai oleh kepala kantor BP2KB kota.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak adalah keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan. Menurut Sumodiningrat (1999:225) keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan merupakan masalah cukup serius yang membuat masyarakat semakin tidak berdaya. Menyikapi masalah tersebut pemerintah Kota Pontianak melakukan kebijakan penyaluran bantuan modal usaha kepada kelompok UPPKS yang besarnya sekitar Rp 483.000.000- setiap tahun, dengan asumsi bahwa masyarakat yang telah dibantu dapat meningkatkan aktivitas usaha yang selama ini telah mereka jalani, agar tingkat kesejahteraannya semakin meningkat. Namun dalam kenyataannya kebijakan penyaluran bantuan modal usaha bagi UPPKS belum mampu meningkatkan aktivitas usaha mereka yang ditandai dengan masih besarnya tunggakan pinjaman bantuan modal usaha yang macet dan tidak diansur pembayarannya.

Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan daerah dan merupakan pengembangan praktek pelayanan publik yang mencirikan praktek good governance, yakni praktek sistem pelayanan publik yang efisien, berkeadilan, transparan, akuntabel serta partisipatif. Sehingga pemerintah akan semakin peduli dengan kebutuhan dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Tujuan kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS adalah untuk peningkatan kualitas hidup kelompok UPPKS menuju keluarga sejahtera dan bahagia.

Salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin adalah kebijakan pemberdayaan keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS). Keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok UPPKS adalah suatu kelompok masyarakat keluarga miskin yang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam suatu wadah pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Kelompok UPPKS beranggotakan ibu/wanita dari keluarga prasejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) maupun keluarga lain yang tahap kesejahteraannya lebih tinggi, baik yang belum, sedang, maupun purna peserta KB (Kanwil BKKBN Kalbar, 1999: 6).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak belum berhasil mencapai tujuan kebijakan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kapasitas aparat pelaksana kebijakan dalam menerapkan kegiatan organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dengan demikian yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini adalah konsep komitmen dan keberpihakan yang seyogyanya melekat dalam diri aparat pelaksana kebijakan dari tingkat pimpinan puncak (walikota) sampai tingkat pelaksana (petugas lapangan dan jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan) jika hendak mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat miskin.

Implikasi hasil penelitian ini adalah diharapkan adanya komitmen dan keberpihakan yang kuat para implementor, maka implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak—yang dilakukan melalui serangkaian aktivitas kegiatan pembinaan peningkatan pengetahuan dalam berusaha, peningkatan peran dan fungsi kelompok dalam berusaha, peningkatan usaha/produksi, peningkatan akses terhadap mitra usaha dan

peningkatan jaringan pemasaran bagi usaha kelompok UPPKS—dapat diwujudkan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikemukakan konsep baru bahwa komitmen dan keberpihakan aparat pelaksana (implementor kebijakan) sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa komitmen dan keberpihakan implementor maka kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Walikota Pontianak beserta jajarannya yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian di Kota Pontianak. Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pontianak beserta jajarannya, yang telah membantu penelitian ini. Serta kepada rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan artikel ini. Pihak dan lembaga lain yang tidak disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. kepada istriku tercinta Hj. Dra. Susminar, serta ketiga anak-anakku tersayang Adib Rabani Putratama, Adilla Marami Farahiyah dan Arjuna Zawani Taris, yang banyak memberikan dorongan moril, materil, dan do'a, yang menjadi penyemangat bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Barat. 1999. *Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan UPPKS*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Khan, A. R. (2016). Policy Implementation: Some Aspects and Issues. *Journal of Community Positive Practice*. XVI(3): 3-12.

- Khan, A. R., & Khandaker, S. (2016). A Critical Insight into Policy Implementation and Implementation Performance. *Public Policy and Administration*. 15(4): 538-548.
- Maryuni, S. (2015). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak. *Spirit Publik*. 10(1): 9-30.
- Niko, N. 2019. Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan sebagai bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol 6 (1): 58-76.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak*. Perda Kota Pontianak 2008 Nomor 11
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2008 tentang *Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pontianak*. Perda Kota Pontianak 2008 Nomor 45
- Priambodo, M. P. (2015). Implementasi Kebijakan Pariwisata dan Perwujudan Pembedayaan Masyarakat di Kota Batu. *JSEP*. 7(2): 27-34.
- Proefschrift. (1974). *Understanding How Actors Influence Policy Implementation*. Universiteit Twente.
- Revida, Erika. 2005. *Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Birokrasi Terhadap Motivasi Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Industri Di Kota Medan Sumatera Utara*. Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- Saefullah, A.Djadja. 2007, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Jakarta: LP3AN.
- Signe, L. (2017). *Policy Implementation: A Synthesis of the Study of Policy Implementation and the Causes of Policy Failure*. Policy Paper PP-17/03: OCP Policy Center.
- Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Science*. 4: 197-209.
- Sonda, J., Kiyai, B., & Kolondam, H. (2016). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Kebijakan Publik*. IV(62): 72-82.
- Stachowiak, S., et. al. (2016). *Beyond the Win: Pathways for Policy Implementation*. ORS Impact & the Atlas Learning Project.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tika, F. Y. A., Hanafi, I. & Riyanto. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(2): 188-196.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

**JUDUL ARTIKEL (MAKSIMAL 15 KATA, AKURAT, JELAS,
MENCERMINKAN ISI TULISAN (CAMBRIA 13, BOLD) JUDUL BAHASA
INDONESIA**

**ARTICLE TITLE (MAXIMUM 15 WORDS, ACCURATE, CLEAR, REFLECT
WRITING CONTENT (CAMBRIA 13, BOLD) INGGRIS TITLE**

Nama Penulis Pertama^{1a}, Nama Penulis Kedua²

¹ Program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.

^a Korespondensi: Nama Lengkap Penulis, E-mail: **Nama.lengkap@gmail.com**

(Diterima: 28-09-2018; Ditelaah: 29-09-2018; Disetujui: 30-10-2018)

ABSTRACT

Abstracts are written systematically reflecting the objectives of the society methods, and results of research or assessment. In addition, the abstract must also be written effectively to describe the substance of writing in no more than 250 words. All written in Indonesian according to EYD with Arial 10pt font type, single space, A4 paper format with top and left margins 3cm, right and below 2.5cm. Abstract cannot contain images, tables, equations, and citations. Abstract should be written in two language English and Indonesian. Please refer to this template

Keywords: alphabet, maximum 5 words [Arial10, single-line spacing].

ABSTRAK

Abstrak ditulis secara sistematis yang mencerminkan unsur tujuan Penelitian atau kajian review, metode, dan hasil Penelitian. Selain itu, abstrak juga harus ditulis secara efektif menggambarkan substansi tulisan tidak lebih dari 250 kata. Semua ditulis dengan Bahasa Indonesia sesuai EYD dengan tipe font Arial 10pt, spasi tunggal, format kertas A4 dengan margin atas dan kiri 3 cm, kanan dan bawah 2.5 cm. Abstrak tidak boleh mengandung gambar, tabel, persamaan, dan sitasi. Abstrak di tulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Indonesia peletakannya mengacu pada nyatu pada templet.

Kata Kunci: alfabetik, maksimal 5 kata (Arial10, single-line spacing)

Penulis Pertama., & Penulis kedua. (Tahun terbit). Judul Lengkap Bahasa Indonesia. *Nama Jurnal*, Vol(tahun1/2), halaman pertama- halaman terakhir.

PENDAHULUAN

Judul bab harus ditulis dalam huruf kapital jenis hurufnya inherit ukuran font 13) Adapun isi paragraph ditulis dalam huruf Cambria ukuran font 12, spasi 1 (single-line spacing). Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Jurnal Sosial Humaniora (JSH) mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial humaniora melalui penerbitan karya ilmiah berbasis hasil penelitian (orisinal).

Jenis naskah yang dipublikasikan adalah naskah orisinal hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dalam proses publikasi oleh media

publikasi lain dan terbebas dari plagiarisme. Bahasa publikasi adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setiap naskah yang masuk ke dewan redaksi akan menjalani proses *peer-review*.

Naskah hasil penelitian harus didasarkan atas data hasil penelitian orisinal yang belum dipublikasikan dan dianalisis menggunakan metode statistik. Naskah hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif tanpa rancangan penelitian yang dikontrol oleh peneliti, naskah hasil penelitian yang hanya berupa pengulangan (replikasi) dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan, misalnya hanya kondisi geografisnya yang berbeda, tidak akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan. Naskah bernomor seri tidak dapat diterima, kecuali disampaikan dan disajikan pada waktu yang bersamaan.

MATERI DAN METODE

Pada bagian ini berisi materi dan metode penelitian. Materi merupakan konsep konsep yang berkaitan dengan focus penelitian, baik berupa state of the art maupun penelitian terdahulu.

Adapun metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, metode, teknik sampling, jumlah populasi dan sampel, serta lokasi penelitian.

Naskah yang diajukan ditujukan ke Pimpinan Dewan Redaksi Jurnal Sosial Humaniora, dikirim ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720 atau melalui *e-mail* ke jsh.lppm@unida.ac.id dan lppm@unida.ac.id. Naskah dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Orisinalitas dan Pemindahan Hak Publikasi yang ditandatangani oleh semua penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian, termasuk hasil analisis statistiknya dipaparkan secara terperinci

dalam bagian ini. Ilustrasi, jika diperlukan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan/atau gambar. Tabel dan gambar harus sederhana, informatif, mudah dipahami, dan mandiri, dalam arti tabel atau gambar dimaksud harus bisa menjelaskan kepada pembaca sehingga pembaca tidak harus membaca tulisannya untuk memahaminya. Hal yang sudah dijelaskan dalam tabel atau gambar tidak perlu diulang dalam tulisan. Tabel dan gambar dimuat pada halaman terpisah dari teks.

Hasil penelitian selanjutnya dibahas dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian pada topik serupa dari peneliti sebelumnya untuk mengungkap keajegannya (konsistensinya) apakah konsisten (sama) atau berbeda, lalu jelaskan alasan ilmiahnya atas hasil dimaksud secara lugas dan tuntas sehingga memperjelas posisi hasil penelitiannya. Selanjutnya, temuan hasil penelitian diungkapkan disertai kelebihan dan kelemahannya, jika ada.

Ungkapan temuan hasil penelitian ini akan mempermudah dalam menyimpulkan hasil penelitian. Data rata-rata perlakuan harus ditulis dengan galat bakunya (standard errors). Tingkat signifikansi statistik dapat dinyatakan dalam $P < 0,05$, $P < 0,01$, dan $P < 0,001$. Khusus pada tabel, tingkat signifikansi dimaksud, berturut-turut dapat ditulis dengan *, **, dan *** sedangkan pada tabel dan grafik, perbedaan antarperlakuan dapat ditunjukkan dengan huruf a, b untuk $P < 0,05$ dan A, B untuk $P < 0,01$.

Penulisan Nama Penulis yang Diacu pada Teks

Nama penulis yang diacu di dalam teks tidak diperkenankan menggunakan *footnote*. Jika jumlah penulis kurang dari tiga nama penulis ditulis semua, jika jumlah penulis tidak kurang dari tiga, hanya penulis utama yang ditulis dan

diikuti dengan *et al.* Contoh: Syamsah (2010) menyimpulkan bahwa pajak dan zakat memiliki hubungan reduktif dan deduktabel. Parameter kualitas layanan puskesmas secara simultan mempengaruhi kepuasan pasien (Yuningsih dan Maulana 2010). Kekurangan dari kualitas pelayanan rumah sakit dapat diatasi apabila rumah sakit memperhatikan karakteristik pasien (Rahmawati *et al.* 2010). Tingkat kepuasan pasien menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan (Yuningsih dan Maulana 2010; Rahmawati *et al.* 2010).

Tabel

Tabel harus dibuat sesederhana dan sesedikit mungkin, namun sekurang-kurangnya harus memuat dua baris data. Jika hanya ada satu baris data, maka penyajiannya harus menggunakan grafik. Garis horisontal tabel hanya boleh untuk mencirikan batas baris teratas (*heading*) dan garis terbawah dari badan tabel, sedangkan garis-garis kolom tabel tidak diperkenankan. Tabel dibuat dengan menggunakan fungsi tabel dalam program *microsoft office word*. Judul tabel harus ringkas, jelas, dan informatif, diberi nomor urut angka arab, huruf kapital hanya pada huruf pertama judul tabel kecuali beberapa nama diri, dan ditempatkan di atas badan tabel. Lazimnya, peubah disajikan dalam baris dan perlakuan disajikan pada kolom tabel. Keterangan tabel disajikan di bagian bawah badan tabel tanpa menuliskan kata keterangan. Di dalam teks, nomor tabel harus dirujuk, misalnya: kepribadian dalam pandangan Islam merupakan integrasi sistem kalbu,

akal, dan nafsu (Tabel 1). Judul tabel, tabel dan keterangan tabel disajikan pada halaman tersendiri setelah Daftar Pustaka. Lebar tabel 80 mm atau 160 mm. Jangan Menyisipkan tabel pada bagian teks, contoh tabel lebar 80mm :

Tabel 1. Daftar Harga Jurnal

Jumlah	Jurnal Sosial Humaniora (Rp/eksemplar)	Cetak lepasnya*) (Rp/eksemplar)
1-5	75.000	30.000
6 atau lebih	60.000	25.000

*) pemesanan minimal 5 eksemplar

Penulis yang naskahnya telah dipublikasikan akan mendapatkan satu Jurnal Humaniora dan dua eksemplar cetak lepas (*reprint*) artikelnya. Penulis yang ingin menambah jumlah jurnal dan cetak lepasnya dapat memesannya ke Dewan Redaksi melalui telefon atau email. Berikut ini adalah daftar harga Jurnal Humaniora dan cetak lepasnya, belum termasuk ongkos kirim.

Gambar dan Grafik

Gambar dan grafik dibuat dalam format JPEG dan hanya diperbolehkan jika data hasil penelitian tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Grafik yang dibuat dengan program *microsoft office excel* harus diubahsuiakan menjadi format JPEG dengan kualitas gambar yang layak cetak. Ukuran lebar gambar adalah 80 mm atau 160 mm. Judul gambar harus ringkas, jelas, dan informatif, diberi nomor urut angka arab, huruf kapital hanya pada huruf pertama judul gambar kecuali beberapa nama diri, dan ditempatkan di bagian bawah gambar. Contoh gambar berformat JPEG lebar 80 mm (Gambar 1).



Gambar 1. Empat tingkat domain untuk menghadapi agroterorisme (ubah sesuai dari Konten 2000).

KESIMPULAN

Kesimpulan memuat temuan hasil penelitian yang mencerminkan kebaruan, keorisinilan, kepioneran, keuniversalan, dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan dalam simpulan terbebas dari frasa atau istilah statistik, seperti "berpengaruh nyata ($P < 0,05$)".

Penulis harus menjelaskan implikasi hasil penelitiannya dalam pengembangan keilmuan, dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan/atau hukum. Implikasi dipaparkan dalam bahasa yang sederhana agar pembaca noncendekia dapat memahaminya dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis bertanggung jawab atas kebenaran semua sumber pustaka yang dirujuk dan dituliskan dalam Daftar Pustaka dan yang diacu dalam teks. Sumber pustaka sangat dianjurkan menggunakan terbitan terbaru (10 tahun terakhir), dan disajikan secara alfabet dan dituliskan menurut format nama tahun serta menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zootero, dsb. Beberapa format dan contoh penulisannya antara lain:

Naskah jurnal atau abstrak. Format: Penulis *Jurnal Sosial Humaniora* diwajibkan Untuk mensitasi *Jurnal Sosial Humaniora* Nama Penulis. Tahun. Judul. Nama Jurnal. Volume: Halaman. Contoh:

Rahmawati R, G Praditina dan RA Munjin. 2009. Model pelayanan rumah sakit berbasis karakteristik sosial ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pasien. *Jurnal Sosial Humaniora*. 1(1): 18-29.

Seran G G. 2018. Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Perilaku Memilih Dalam Pilpres 2014. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2): 117-126.

Kusumawardhani Y. 2019. Analisis Manajemen Resiko Berbasis ISO 31000;2009 Pada Model Optimasi Pengembangan Destinasi Wisata Spritual. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1): 28-39.

Buku Format: Nama Penulis atau Nama Editor atau Nama Lembaga. Tahun. Judul. Edisi, Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Roestamy M. 2011. Konsep-konsep hukum kepemilikan properti bagi asing (dihubungkan dengan hukum pertanahan). Edisi pertama. PT. Alumni. Bandung.

Bab buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Dalam: Judul buku atau proseding (Nama Editor). Volume: Halaman. Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Goulet D. 2000. Ethics, culture and development: livestock, poverty and quality of rural life. In: Livestock, ethics and quality of life (eds. Hodges, John and Han, In K). 131-154. CABI Publishing, New York, NY 10016, USA.

Laporan pada pertemuan ilmiah (konferensi, workshop, dll) yang tidak tercakup dalam buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Judul atau Nama Pertemuan Ilmiah, Tempat Pertemuan. Jumlah halaman. Contoh:

Jalal F. 2011. Tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 hal.

Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:

Jalal F. 2011. Tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 hal.

Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:

Roestamy M. 2008. Kepastian hukum atas kepemilikan rumah dan bangunan gedung oleh investor asing dikaitkan dengan asas nasionalitas dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Karya Ilmiah Lepas yang dimuat pada *Website*. Karya ilmiah lepas yang dimuat pada website hanya dapat digunakan jika literatur standard lainnya tidak tersedia. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Diunduh tanggal-bulan-tahun dari <http://...> Contoh:

Bryant P. 1999. Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999 from <http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlepage.htm>.

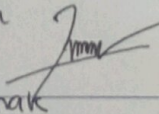
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS¹

Kepada
 Dewan Editor Jurnal Sosial Humaniora
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 Universitas Djuanda Bogor

Bersama ini kami mengajukan naskah,

Judul: Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin di Kota Pontianak

Penulis:

No	Penulis lengkap dengan gelar akademik	Nama dan Alamat Institusi, email	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Martoyo, M.A.	Fisip, Universitas Tanjungpura Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak		
2				
3				
4				

untuk dipublikasikan pada Jurnal Sosial Humaniora. Kami menyatakan bahwa naskah dimaksud adalah naskah orisinal hasil penelitian kami yang belum pernah dipublikasikan, tidak sedang dalam proses publikasi oleh media publikasi lainnya, tidak akan diajukan ke media publikasi lainnya selama dalam proses penelaahan (*review*) kecuali jika kami menarik secara resmi naskah dimaksud dari Dewan Redaksi Jurnal Sosial Humaniora, terbebas dari plagiarisme, dan kami bertanggung jawab atas seluruh substansi naskah berjudul tersebut di atas yang kami tulis.

Nama penulis untuk korespondensi:

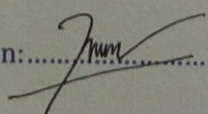
Telefon/ (hanya digunakan untuk keperluan korespondensi)

Email: Martoyo@gmail.com (untuk keperluan korespondensi dan akan dicantumkan pada artikel yang dipublikasikan)

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Tanggal: 1 Nopember 2019.

Penulis: Dr. Martoyo, M.A.

Tanda tangan: 

¹ Dikirim ke Dewan Redaksi JSH, LPPM Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, difaksimilikan ke 02518240985, dan hasil *scanning*-nya diemailkan ke jsh.lppm@unida.ac.id dan lppm@unida.ac.id.